

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
DI WEBSITE PEMERINTAH**

(Skripsi)

Oleh

Ayu Yanuaraisya



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

Characteristics Influence Analysis of Government On The Level of Financial Statements On Government Websites

By

Ayu Yanuaraisya

The development of the Internet brought about changes in the spread of information, including financial information. Internet can be used as a means for the government to increase transparency and accountability. The purpose of this study is to demonstrate empirically the effect of the characteristics of the local government are regional assets, population and the size of government on the disclosure of financial statements in the government's website.

The data used in this research is secondary data, the government is taken as a sample of 65 local authorities. Data were analyzed using multiple regression analysis with SPSS 17.0 software, as well as the t statistical test of hypothesis testing.

The research proves that regional assets, and population no effect on the disclosure of financial statements in the government's website, while the size of government has a positive and significant impact on the disclosure of financial statements in the government's website.

Keywords: Regional Assets, Population, Government Size, Financial Statements On Government Websites.

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Website Pemerintah

Oleh

Ayu Yanuaraisya

Perkembangan internet membawa perubahan dalam penyebaran berbagai informasi, termasuk informasi keuangan. Internet dapat digunakan sebagai salah satu sarana bagi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik pemerintah daerah yaitu kekayaan daerah, jumlah penduduk dan ukuran pemerintah terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs kementerian dalam negeri, badan pusat statistik, dirjen pajak serta situs badan pemeriksa keuangan dan situs pemerintah yang bersangkutan, pemerintah yang diambil sebagai sampel sebanyak 65 pemerintah daerah. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan software SPSS 17.0, serta uji statistik t sebagai uji hipotesis.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel kekayaan daerah, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah, sedangkan ukuran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.

Kata Kunci : Kekayaan Daerah, Jumlah Penduduk, Ukuran Pemerintah, Pengungkapan Laporan Keuangan Di Website Pemerintah.

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
DI WEBSITE PEMERINTAH**

Oleh

Ayu Yanuaraisya

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

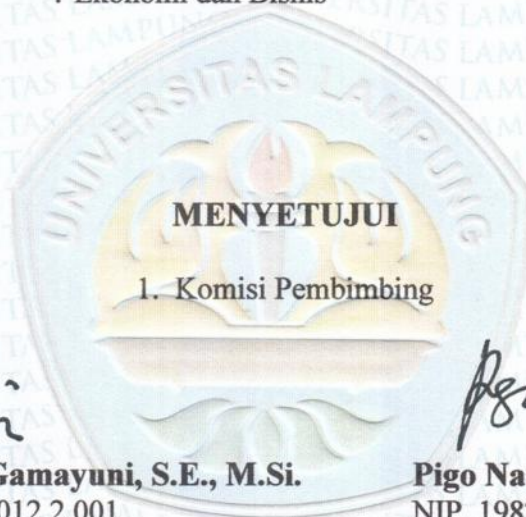
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI
WEBSITE PEMERINTAH**

Nama Mahasiswa : *Ayu Yanuaraisya*

No. Pokok Mahasiswa : 1111031018

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Rani
Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

Pigo Nauli
Pigo Nauli, S.E., M.Sc.
NIP 19820623 200812 1 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Fajar Gustiawaty Dewi
Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001

MENGESAHKAN

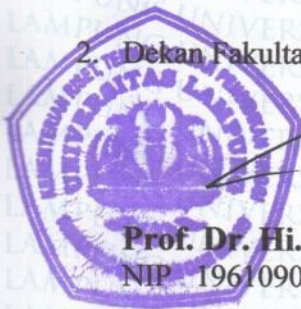
1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.** 

Sekretaris : **Pigo Nauli, S.E., M.Sc.** 

Penguji Utama : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.** 

2. Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 April 2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Yanuaraisya

NPM : 1111031018

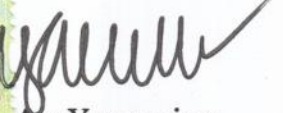
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Bandar Lampung, 28 April 2016



Yang Menyatakan


Ayu Yanuaraisya
NPM 1111031018

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung tanggal 24 Januari 1994 sebagai putri kedua dari tiga saudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Taruna Jaya, Bandar Lampung tahun 1999. Di lanjutkan dengan pendidikan dasar di SDS Al-Kautsar, Bandar Lampung dan lulus tahun 2005. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 09 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2011.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2011 melalui jalur SNMPTN Undangan.

MOTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang akan mengubahnya (QS: Al-Ra'du:12)

MAN SHABARA ZHAFIRA

(siapa yang bersabar pasti beruntung)

It's a lie to think you're not good enough.

It's a lie to think you're not worth anything.

(Nick Vujicic)

Never stop dreaming, never look back and never give up!

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang,

Karya ini ku persembahkan kepada:

Orangtuaku tercinta Papa M.Anthoni dan Mama Rodiyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan yang tak ada henti-hentinya selama ini.

Kakak dan Adikku Dian Septi Delpia, S.Ip dan Randy Karima yang selalu memberikan semangat, doa dan motivasi untukku.

Almamater tercinta jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Website Pemerintah*” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E.,M.Si. sebagai dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc. sebagai dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan saran-sarannya selama proses penyelesaian skripsi.

6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E.,M.Si.,Akt. Selaku dosen penguji, atas saran dan masukan yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E.,M.Si. sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan.
9. Orangtuaku tercinta Papa M.Anthoni dan Mama Rodiyah yang senantiasa memberikan nasihat, doa dan dukungan kepada dek ayu . Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
10. Kakak dan Adikku Dian Septi Delpia, S.Ip dan Randy Karima yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah dek ayu.
11. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
12. Kepada Muhamad Yoga Febrianto yang selama ini menemani susah senang dari awal kuliah sampai akhir. Terima kasih banyak atas perhatian, support dan kasih sayangnya kepada aku.
13. Terima kasih kepada Riris, Sofa, Hanny, Yulia, Rika, Mitha, Aya, Puput, KakMareta. Atas kebersamaan yang telah terjalin selama perkuliahan ini. Semoga persahabatan ini akan terus terjalin.
14. Sahabat-sahabat Cipika-Cipiki Fidya Junissa, Pertiwi Agustina, Cecilia Ariani, Rizka Indira, Mia Respani, Dwitya Agung dan Yudhi Haprinaldi terima kasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan.
15. Kepada Farah Dina, Grihdalorenza, Bella dita, Sherly, Panggih, Arjuna, Kurniawansyah, Andueriganta, Erlian(bram), Alif Ilham, Lian, Billy, Restu yang memberikan semangat dan banyak membantu penulis selama ini.
16. Kepada sahabat-sahabatku dari SD sampai sekarang Annisa Silvera, Annisa Pratiwi, Salsabilla F, dan oldy yang telah memberikan masukannya kepada penulis.
17. Teman-teman AKT 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya selama ini.

18. Teman-teman KKN desa Pesawaran Indah dusun Wonorejo 3 Pesawaran, bang ucok, bang wahyu, bang tomy, yola, gita, sofa, wahyu, maya dan koko terima kasih atas pengalaman yang tidak akan terlupakan selama 40 hari.

19. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, aamiin. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 29 April 2016

Penulis,

Ayu Yanuaraisya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan dan Batasan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
II. LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Atribusi.....	7
2.2 Teori signaling	8
2.3 Laporan Keuangan Pemerintah.....	9
2.3.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	11
2.3.2 PP 71 Tahun 2010.....	13
2.4 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Website Pemerintah.....	18
2.5 Karakteristik Pemerintah	20
2.5.1 Kekayaan pemerintah.....	20
2.5.2 Ukuran Pemerintah.....	21
2.5.3 Jumlah Penduduk	23
2.6 Penelitian Terdahulu	24
2.7 Model Penelitian	26
2.8 Hipotesis Penelitian	26
2.8.1 Kekayaan Pemerintah.....	26
2.8.2 Jumlah Penduduk.....	27
2.8.3 Ukuran pemerintah	28

III METODE PENELITIAN

3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	29
3.2	Instrumen Variabel Penelitian	29
3.2.1	Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Website ...	30
3.2.2	Karakteristik Pemerintah	31
3.3	Metode Analisis Data	32
3.3.1	Statistik Deskriptif	32
3.3.2	Uji Asumsi Klasik	32
3.4	Pengujian Hipotesis	34

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	36
4.1.1	Data dan Sampel	36
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif	37
4.2	Uji Asumsi Klasik	38
4.2.1	Uji Normalitas	38
4.2.2	Hasil Uji Multikolineritas	39
4.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	40
4.2.4	Hasil Uji Autokorelasi	41
4.3	Pengujian Hipotesis	42
4.3.1	Uji Statistik F	42
4.3.2	Uji Koefisien Determinasi	43
4.3.3	Uji Hipotesis	44
4.4	Pembahasan	46

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	49
5.2	Keterbatasan Penelitian	50
5.3	Saran	50

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	24
4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	36
4.2 Statistik Deskriptif	37
4.3 Hasil Uji Normalitas	39
4.4 Hasil Uji Multikonejaritas	40
4.5 Hasil Uji Autokorelasi	41
4.6 Uji Statistik F	42
4.7 Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R^2)	43
4.8 Hasil Uji Hipotesis	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

	Halaman
2.1 Model Penelitian	26
4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Daftar Item Pengungkapan
2. Sampel Penelitian
3. Variabel Indeks Pengungkapan
4. Data Mentah Variabel Penelitian
5. Statistik Deskriptif
6. Uji Asumsi Klasik dan Perhitungan Regresi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Keuangan dan Otonomi Daerah telah merubah iklim pelaksanaan pemerintahan. Akuntabilitas dan transparansi mulai diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah menyusun laporan keuangan, BPK mengaudit dan menyampaikan kepada DPRD. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah provinsi sebenarnya tidak hanya diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat tetapi juga masyarakat secara luas. Informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Proses digitalisasi terjadi di semua organisasi disebabkan oleh biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi dalam menyampaikan suatu informasi serta kekuatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan konvensional (Bonson & Escobar,

2005). Teknologi komunikasi dan informasi mengacu kepada penggunaan teknologi seperti: internet, intranet, ekstranet, *e-government*, ERP, dan bentuk teknologi lainnya yang menghadirkan kemajuan bagi entitas ekonomi. Lebih dari 19% dari seluruh organisasi Pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi *e-government* dengan tingkatan yang berbeda (West, 2005).

Website pemerintah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet (Laswad et.al, 2005). Hampir semua Pemerintah di Indonesia memiliki *website*, dengan kualitas *website* dan peranan yang berbeda. Ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang provinsi tersebut, namun ada juga yang telah memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan dan sarana berkomunikasi secara interaktif dengan warganya.

Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai manfaat media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya adalah PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 3 Tahun 2007, dan Permendagri No. 7A Tahun 2007. Media elektronik pada ketiga peraturan yang dimaksud dapat merujuk kepada *website* milik Pemerintah yang dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan pemerintah melalui media elektronik adalah: informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan (PP No. 3

Tahun 2007 dan Permendagri No. 7A Tahun 2007) dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (PP No. 6 Tahun 2008). Merujuk pada tiga peraturan tersebut, pengungkapan informasi selain informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah dapat digolongkan sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat pesat membuat pengguna internet dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat. Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara pengguna internet terbanyak di Asia (*www.internetworldstats.com*). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memproyeksikan jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 63 juta pengguna pada tahun 2012 dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2014 mencapai 107 juta pengguna. Perkembangan internet membawa perubahan dalam penyebaran berbagai informasi, termasuk informasi keuangan. Internet dapat digunakan sebagai salah satu sarana bagi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian Muhammad (dalam Rahman dkk, 2013) menunjukkan bahwa website pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemda terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan (Muhammad, dalam Rahman dkk., 2013). Dengan kata lain, setiap pemda memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri untuk melakukan publikasi atau tidak melakukan publikasi laporan keuangan melalui website yang dimiliki.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk menggali bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah melalui internet (*website*). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian oleh Laswad, dkk (2005) dan Hilmi (2012) menunjukkan hasil bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah di internet. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Hudoyo (2014) dengan hasil tidak berpengaruh. Hasil berpengaruh positif signifikan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah di internet ditunjukkan dalam hasil penelitian Hilmi (2012), dan hasil tidak berpengaruh dihasilkan oleh penelitian Afriani (2014). Lalu, ukuran pemerintah menurut Laswad, dkk (2005) dan Dyah (2012) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah di internet. Sedangkan ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah di internet ditunjukkan dalam penelitian Puspita (2012).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pemerintah yang memiliki *website* resmi telah mengungkapkan laporan keuangannya dalam *website* Pemerintah, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses *website* tersebut. Maka, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di *Website* Pemerintah.”

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kekayaan daerah mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah?
2. Apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah?
3. Apakah ukuran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah?

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah:

- Pemerintah Daerah di Indonesia (Provinsi dan Kota/ Kabupaten) yang memiliki *website* pemerintah daerah.
- Pemerintah daerah Provinsi/ kabupaten/kota yang telah menyusun laporan keuangan tahun 2014.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.
2. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh jumlah penduduk terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.
3. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh ukuran pemerintah terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah referensi ilmu pengetahuan terkait pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemerintah.
- Memberikan masukan penulis tentang pentingnya pemahaman mengenai pengungkapan laporan keuangan di website pemerintah.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai acuan untuk lebih baik dalam mengungkapkan laporan keuangannya di *website*.
- Bagi organisasi terkait (pemerintah Provinsi dan Kota/ Kabupaten) dan bagi penelitian selanjutnya, diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat memberi masukan untuk memahami lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pengungkapan laporan keuangan di website pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Teori agensi mengasumsikan bahwa CEO (agen) memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak dapat mengamati kegiatan yang dilakukan agen secara terus-menerus dan berkala. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, maka prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi inilah yang disebut asimetri informasi. Konflik inilah yang kemudian dapat memicu biaya agensi.

Terdapat dua pihak dalam *agency theory* yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent* (Halim dan Abdullah 2006). *Agency problem* muncul ketika *principal* mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent* (Zimmerman 1977). Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di Pemerintahan antara rakyat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan

kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*. Dalam konsepsi pemberian informasi melalui internet kepada publik dapat dijadikan alat untuk mengurangi konflik keagenan.

2.2 Teori signalling

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap keputusan investasi pihak di luar pemerintah. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup, informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh pihak di luar pemerintah sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat.

Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, penjelasan lebih detail dalam *website*.

Pemerintah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa Pemerintah telah menjalankan amanat

yang diberikan oleh rakyat. Pengungkapan atau *disclosure* dalam literatur akuntansi dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan yang bersifat wajib dan sukarela. Fokus dalam penelitian pengungkapan di sektor privat seringkali pada pengungkapan sukarela, karena pengungkapan tersebut mencerminkan inisiatif untuk lebih transparan dalam pengelolaan organisasinya.

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah

Sesuai PP No. 71 tahun 2010, Pernyataan Nomor 1 Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

- menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
- menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnyadan memenuhi kebutuhan kasnya;
- menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitaspelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengananggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

2.3.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP yang kemudian akan digantikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dan diterapkan selambat-lambatnya tahun 2015.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (Tanjung, 2008:31).

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Sesuai amanat Undang-Undang tersebut, Presiden menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang KSAP tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang KSAP. Keppres tersebut menguatkan kedudukan KSAP dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 308/KMK.012/2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 13 Juni 2002.

KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang SAP kepada Menteri Keuangan untuk Proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah (Jannaini, 2012).

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. (PP No. 71 Tahun 2010).

2.3.2 PP 71 Tahun 2010

Dalam PP 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang SAP berbasis kas menuju akrual, terdapat sebelas PSAP yaitu sebagai berikut:

1. PSAP No. 01 (Penyajian Laporan Keuangan)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu

basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual sepenuhnya tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. PSAP No. 02 (Laporan Realisasi Anggaran)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yaitu: Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus atau defisit, Penerimaan pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan, Pembiayaan neto, dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

3. PSAP No. 03 (Laporan Arus Kas)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

4. PSAP No. 04 (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas

harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. PSAP No. 05 (Akuntansi Persediaan)

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar: Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

6. PSAP No. 6 (Akuntansi Investasi)

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

7. PSAP No. 07 (Akuntansi Aset Tetap)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

8. PSAP No. 08 (Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

9. PSAP No. 09 (Akuntansi Kewajiban)

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

10. PSAP No. 10 (Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa)

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11. PSAP No. 11 (Laporan Keuangan Konsolidasian)

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

2.4 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Website Pemerintah

Di Indonesia, perkembangan penggunaan website oleh Pemda di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia yang diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Selama 3

tahun sejak berlakunya Inpres No. 6 tahun 2001, hanya 182 dari 385 Pemda (kabupaten, kota, dan propinsi) yang memiliki website dan dari 182 website tersebut hanya 150 yang bisa diakses (Rose, 2004).

Tingkat pengungkapan di *website* dilakukan dengan membagi pengungkapan ke dalam pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan dari *website*. Konten *website* berisi mengenai informasi apa saja yang dapat diungkapkan entitas pelaporan pada *website* yang digunakannya. Perez et. al. (2005) mencoba merumuskan konten dari informasi yang dimasukkan ke dalam *website*. Terdapat tiga tipe konten informasi yang dapat disediakan Pemerintah di *websitenya*, yaitu: (1) Informasi laporan. (2) Informasi keuangan. (3) Indikasi manajemen dan pelayanan yang diberikan. Presentasi *website* merepresentasikan desain, navigasi, fitur, dan *tools* yang ada pada *website* milik entitas ekonomi pada *website* miliknya sehingga *website* menjadi lebih menarik atau lebih mudah diakses oleh *users*. Penelitian ini berfokus pada tingkat pengungkapan konten laporan keuangan pemerintah. Tingkat pengungkapan diukur dengan *Indeks Internet Financial Reporting*.

Untuk mengukur tingkat pengungkapan tersebut, dibuat ceklis dengan acuan dari Perez et al. (2005) dan Garcia-Sanchez et al. (2013). Ceklis (Lampiran 1) terdiri dari empat bagian besar kelompok indikator yaitu:

1. Berita tentang keuangan, berupa berita tentang proses anggaran, penyerapan anggaran, laporan keuangan Pemda dan hasil audit BPK
2. APBD terdiri dari APBD awal, APBD perubahan dan realisasi APBD

3. Laporan Keuangan terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
4. Laporan Kinerja terdiri dari LAKIP, LPPD dan ILPPD

Setelah ceklis dibuat, dilakukan pengamatan pada masing-masing website Pemda untuk dinilai ketersediaan informasi yang ada berdasarkan ceklis tersebut. Jika terdapat informasi akan diberi nilai 1 dan jika tidak ada akan diberi nilai 0. Nilai tingkat pengungkapan diperoleh dengan membagi jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Pemda dengan total keseluruhan item ceklis (11 item).

2.5 Karakteristik Pemerintah

Karakteristik pemerintah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada provinsi, menandai sebuah provinsi, dan membedakannya dengan provinsi lain (Purwadarminta, 2006). Karakteristik pemerintah dalam penelitian ini mengambil tiga komponen yaitu kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan ukuran pemerintah.

2.5.1 Kekayaan pemerintah

Kekayaan pemerintah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga 2011). Kekayaan Pemerintah diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah (Santosa dan Rahayu, 2005). Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi daerah yang berasal dari masyarakat masing-masing daerah.

Kekayaan pemerintah yang tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintahan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, serta kesuksesan dalam hal mengelola keuangan. Pemerintah sebaiknya menunjukkan kekayaan daerahnya guna meraih simpati dari masyarakat yaitu dengan melaporkan keuangan lewat internet (Laswad *et al.* 2005).

Kekayaan daerah dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut karena mampu memakmurkan daerahnya secara mandiri sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kelangsungan usahanya. Pengaruh ini juga akan bersimultan dengan pendapatan masyarakat di daerah tersebut sehingga makin menggeliatlah perekonomian. Semakin besar kekayaan pemerintah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan pemerintah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2.5.2 Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya pemerintah. Sesuai dengan pengukuran dalam penelitian Laswad dkk (2005), ukuran pemerintah dalam penelitian ini dinilai dari total aset. Dengan demikian, ukuran pemerintah menggambarkan besar kecilnya pemerintah yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki.

Ukuran pemerintah menunjukkan seberapa besar suatu pemerintahan tersebut. Pemerintah besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada pemerintah kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).

Pemerintah yang memiliki ukuran besardituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Ukuran pemerintahan juga mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah secara positif karena semakin besar ukuran pemerintah menandakan jumlah dan transfer kekayaan yang dikelola oleh perangkat pemerintah semakin besar pula sehingga biaya pemantauan tinggi. Mengingat kebutuhan untuk pengungkapan yang lebih banyak oleh ukuran pemerintah yang besar, internet dapat menjadi sarana sangat efisien dan memuaskan bagi pemerintah berukuran besar (Ettredge, dkk 2002; Pirchegger dan Wagenhofer, 1999 dalam Laswad dkk, 2005).

Suatu pemerintah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemerintah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Pengawasan dan kebutuhan pelaporan yang lebih besar oleh pemerintah yang berukuran besar, menyebabkan pemerintah harus menanggung biaya pengawasan dan biaya pelaporan yang lebih tinggi. Internet merupakan media yang paling efektif bagi

pemda dalam mempublikasikan laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Melalui internet, pemda dapat memberikan informasi keuangan secara cepat, rinci, dan biaya yang ringan.

2.5.3 Jumlah Penduduk

Sesuai dengan *stakeholder theory*, penduduk merupakan salah satu *stakeholder* terpenting pemerintah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar. Riset pendahuluan tentang transparansi keuangan di pemerintah di New Jersey telah mengungkapkan hubungan positif antara jumlah penduduk dengan pengungkapan informasi keuangan (Piotrowski & Bertelli, 2010).

Evans dan Patton (1987) menemukan bahwa populasi adalah variabel yang signifikan dalam pengungkapan keuangan publik, semakin besar populasi pada suatu daerah maka semakin besar tekanan yang diberikan terhadap pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat informasi yang tersedia untuk publik. Daerah yang populasinya banyak, maka permasalahan pemerintah semakin kompleks.

Sementara itu dalam hubungannya dengan transparansi di bidang informasi sosial dan lingkungan di *website* pemerintah daerah di Spanyol, jumlah penduduk juga menunjukkan relasi yang sama (Garcia-Sanchez, 2013). Jadi, pemerintah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah dengan jumlah penduduk lebih sedikit.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

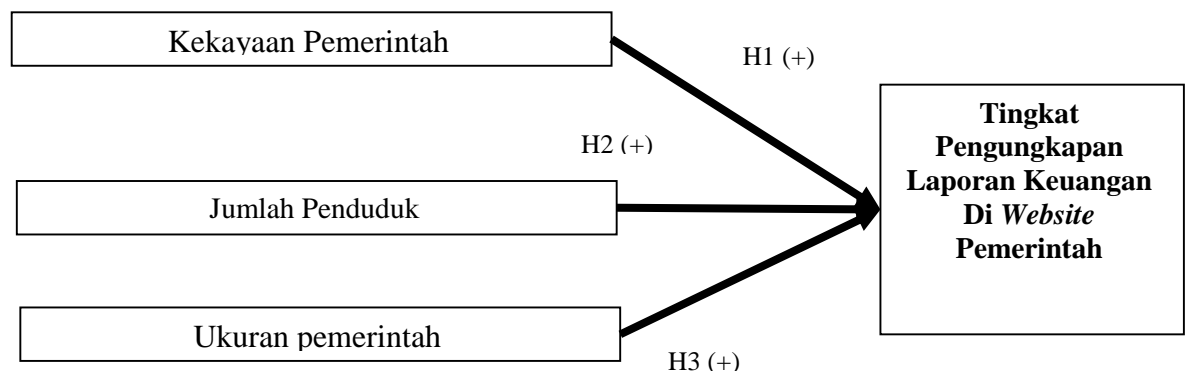
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Fawsi Laswad, Richard Fisher, Peter Oyelere (2005)	Public Sector Financial Disclosure On The internet : a study of new zealand local authorities	<p>Variabel Terikat Pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah</p> <p>Variabel Bebas Kompetisi politik, ukuran, leverage, Kekayaan pemerintahan, visibilitas pers, tipe council</p> <p>Metode Penelitian Statistik deskriptif, Analisis univariat, dan analisis regresi multivariate (regresi logistik)</p>	<i>Leverage</i> , kekayaan Pemerintahan, visibilitas pers memiliki hubungan positif dengan praktik IFR. Tipe council berhubungan negatif dengan praktik IFR. Hubungan positif antara praktik IFR dengan kompetisi politik dan ukuran, tidak didukung.
2.	Puspita, Rora (2013)	Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda	<p>Variabel terikat Tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah</p> <p>Variabel bebas Pengaruh kinerja dan karakteristik pemerintah</p> <p>Metode Penelitian uji beda rata-rata, uji regresi berganda, dan analisis sensitivitas (sebagai pengujian tambahan)</p>	Ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan. Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan. Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap presentasi pengungkapan. Kinerja daerah yang digambarkan sebagai rasio PAD dan Belanja daerah tidak

				berpengaruh terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan untuk <i>website</i> Pemerintah.
3.	Hilmi, Amiruddin Zul dan Dwi Martani. (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi	<p>Variabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - kekayaan daerah - jumlah penduduk - tingkat penyimpangan - tingkat ketergantungan - total aset - jumlah SKPD - jumlah temuan pemeriksaan <p>Metode Penelitian deskriptif kualitatif</p>	Kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Tingkat ketergantungan, total aset, jumlah SKPD, dan jumlah temuan pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.
4.	Setyaningum, dyah, (2012)	Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. ukuran pemerintah 2. ukuran legislatif (dprd) 3. ukuran administratif pemda 4. kekayaan pemerintah 5. diferensiasi fungsional 6. spesialisasi pekerjaan 7. rasio kemandirian keuangan daerah 8. intergovernmental revenue <p>Metode Penelitian Regresi Berganda</p>	Umur administratif pemerintah, kekayaan pemerintah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan, sedangkan intergovernment revenue memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Ukuran pemerintah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan

2.7 Model Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan serta tujuan penelitian juga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka berikut adalah gambar yang menunjukkan kerangka pikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Model Penelitian



2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Kekayaan Pemerintah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah dan Halim, 2006). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984), Laswad *et al* (2005), serta Liestiani (2008) menemukan bahwa kekayaan daerah berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang sama yaitu

semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan.

H1 =Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah

2.8.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau Negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001). Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu stakeholder terpenting Pemerintah Daerah, oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar, besarnya penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintahnya mengingat fungsi Pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Sejalan dengan penelitian oleh Puspita (2012) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan

keuangan di internet. Hal ini menunjukkan daerah yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi akan menyebabkan *willingness* dari Pemerintah tersebut untuk mengungkapkan informasi lebih banyak kepada masyarakat tersebut juga tinggi.

H2 :jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah.

2.8.3 Ukuran pemerintah

Ukuran pemerintah biasanya menjadi faktor yang paling banyak diteliti dalam mencari besarnya tingkat pengungkapan. Terdapat beberapa argumen dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai ada tidaknya asosiasi antara ukuran pemerintah dengan pengungkapan laporan keuangan di *website*. Serrano *et al.* (2008) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara ukuran pemerintah dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan via *website*.

Penelitian Medina (2012) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah. Pemerintah yang memiliki ukuran yang besar akan melakukan pengungkapan laporan keuangan yang tinggi dalam *website* Pemerintah.

H3 : Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah dalam website pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel. Hal ini dilakukan karena penelitian tidak mungkin dilakukan terhadap seluruh anggota populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Indonesia (Provinsi dan Kota/ Kabupaten) yang memiliki website pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini Pemerintah Daerah yang menjadi sampel dipilih berdasarkan *Purposive Sampling* (kriteria yang dikehendaki). Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah yang memiliki website.
2. Pemerintah daerah Provinsi/ kabupaten/kota yang telah menyusun laporan keuangan tahun 2014.

3.2 Instrumen Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiono, 2009). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.2.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Website

Untuk mengukur tingkat pengungkapan tersebut, dibuat ceklis dengan acuan dari Perez *et al.* (2005) dan Garcia-Sanchez *et al.* (2013). Ceklis (Lampiran 1) terdiri dari empat bagian besar kelompok indikator yaitu:

1. Berita tentang keuangan, berupa berita tentang proses anggaran, penyerapan anggaran, laporan keuangan Pemda dan hasil audit BPK
2. APBD terdiri dari APBD awal, APBD perubahan dan realisasi APBD
3. Laporan Keuangan terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
4. Laporan Kinerja terdiri dari LAKIP, LPPD dan ILPPD

Setelah ceklis dibuat, dilakukan pengamatan pada masing-masing website Pemda untuk dinilai ketersediaan informasi yang ada berdasarkan ceklis tersebut. Jika terdapat informasi akan diberi nilai 1 dan jika tidak ada akan diberi nilai 0. Nilai tingkat pengungkapan diperoleh dengan membagi jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Pemda dengan total keseluruhan item ceklis (11 item).

$$IP = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

IP = Indeks pengungkapan

X_{yi} = nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan

n_i = jumlah item untuk pengungkapan i, n_i = 11.

3.2.2 Karakteristik Pemerintah

Karakteristik pemerintah dalam penelitian ini diukur dengan kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan ukuran pemerintah.

3.2.2.1 Kekayaan daerah (KD)

Variabel kekayaan pemerintah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga 2011). Kekayaan Pemerintah diukur kemandirian keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah adalah menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan (Sinaga, 2011).

$$\text{Kekayaan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3.2.2.2 Jumlah penduduk (JP)

Variabel ini menggambarkan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Mulyadi, 2008):

Rumus : Log (jumlah penduduk)

3.2.2.3 Ukuran pemerintah (UP)

Ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya pemerintahan daerah. Sesuai dengan pengukuran dalam penelitian Laswad, dkk (2005), ukuran pemerintah dalam penelitian ini dinilai dari total aset. Dengan demikian, ukuran pemerintah

menggambarkan besar kecilnya pemerintah yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki.

Rumus : $\text{Log}(\text{total aset Pemerintah})$

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi perlu dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil analisis regresi dapat memenuhi kriteria *best*, *linear* dan supaya variabel independent sebagai estimator atas variabel dependent tidak bias. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

3.3.2.1 Uji Normalitas Data

Ghozali (2009) menyebutkan bahwa uji normalitas adalah untuk untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent dan dependent memiliki distrik normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau

mendekati normal. Untuk mengetahui normal atau tidak maka dilakukan uji normalitas menurut Kolmogorof Smirnov satu arah dan analisis grafik Smirnov menggunakan tingkat kepercayaan 5 %. Sebagai dasar pengujian keputusan normal atau tidak yaitu:

- a. $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ maka distribusi populasi tidak normal
- b. $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ maka distribusi populasi normal.

Sedangkan analisis grafik menggunakan grafik histogram dan normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distrik kumulatif dari distribusi normal dalam hal ini distribusi normal akan membantu garis lurus diagonal.

3.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastik bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Apabila varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastik, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastik (Ghozali, 2009).

Model regresi yang baik adalah yang homokedastik atau tidak terjadi heteroskedastik. Heteroskedastik terjadi apabila ada kesamaan deviasi standar nilai variabel dependent pada variabel independent. Hal ini akan mengakibatkan varians koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebihi sehingga hasil uji statistik tidak valid.

3.3.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan uji korelasi antara variabel-variabel independen dengan korelasi sederhana. Menurut Ghazali (2009) uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dimana model regresi yang baik tidak terjadi ortogonal. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam regresi adalah dengan menganalisis korelasi variabel-variabel independen. Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah:

- a. Mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10
- b. Mempunyai angka toleransi mendekati 1

Bila ada variabel independen yang terkena multikolinearitas maka penanggulangannya adalah dengan mengeluarkan satu variabel tersebut dari model.

3.4 Pengujian Hipotesis

Model regresi berganda digunakan untuk menjelaskan pola hubungan antar variabel dengan tujuan mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari seperangkat variabel bebas (*eksogen*) terhadap variabel terikat (*endogen*) (Ghozali, 2009). Persamaan regresi, dalam penelitian ini dimodifikasi sebagai berikut:

$$IP = a + b_1KD + b_2PJP + b_3UP + e_t$$

Keterangan :

IP : Indeks Pengungkapan

KD : Kekayaan Daerah

JP	: Jumlah penduduk
UP	: Ukuran Pemerintah
ϵ_{it}	: <i>Error term</i>

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t. Uji t dapat juga dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Dengan kriteria:

- H_0 diterima apabila nilai *Significance* > tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti H_1 alternatif ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas terpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.
- H_a diterima apabila nilai *Significance* < tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti H_1 alternatif diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian kekayaan daerah yang diukur dengan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah, dapat diketahui bahwa variabel kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.
2. Berdasarkan hasil pengujian jumlah penduduk yang diukur dengan logaritma jumlah penduduk terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah, dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.
3. Berdasarkan hasil pengujian ukuran pemerintah yang diukur dengan logaritma total aset terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah, dapat diketahui bahwa variabel ukuran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

- a. Pemahaman atribut informasi yang digunakan bersifat subjektif, artinya pemahaman terhadap masing–masing atribut yang digunakan tergantung dari pemahaman masing–masing individu. Bisa saja antar individu yang satu dengan yang lain memiliki interpretasi yang berbeda dalam memberikan skor pengungkapan, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dalam pengukuran indeks pengungkapan.
- b. Variabel bebas dalam penelitian ini hanya tiga variabel yang digunakan variabel yang diduga mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perbandingan yang juga dilakukan oleh individu lain untuk mengukur atribut informasi yang diungkapkan melalui *website*, sehingga hasil dari indeks pengungkapan lebih valid;
2. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan seluruh indikator rasio pada laporan keuangan daerah yang belum digunakan untuk mengetahui pengaruh rasio tersebut terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, Halim, Abdul. 2006. *Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Volume 2 Nomor 2, November.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat.
- Budiarto, Bambang. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Ekonomi Daerah*. Surabaya.
- Garcia, I.M.S., Frias, J.V.A., and Rodriguez, L.D. 2013. "Determinants of Corporate Social Disclosure in Spanish Local Governments". *Journal of Cleaner Production* 39: 60-72.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, Edy, Suandi. 2000. *Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta,
- Halim, Abdul. 2007. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 3. UPP AMP YKPN. Yogyakarta:
- Hilmi, A.Z. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Himpunan Peraturan Tentang APBN-APBD, 2012. Penerbit CV Tamita Utama. Jakarta. 2012
- Kuncoro, Haryo. 2007. "Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Lasward, F., Fisher, R., dan Oyelere, P. 2005. Determinant of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*.

- Liestiani, A. 2008. *Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Medina, Febri. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Munir, Dasril, Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Mamesah, D. J., 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta
- Musgrave, Richard A.2003. *Public Finance in Theory and Practise*. Mc Graw Hill Book Company.
- Nordiawan, Deddi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Jilid Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Nurjuha, Anas Arista.2009. Mengukur Tingkat Efektivitas, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 A Tahun 2007 Tentang Tatacara Penyampaian Informasi Dan Tanggapan Atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 dan 59, Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2007. Depdagri RI
- Peraturan Pemerintah Nomor 105, Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006. Depdagri RI.
- Perez, C.C., Hernandez, A.M.L., and Bolivar, M.P.R. 2005. Citizens' Access to On-Line Governmental Financial Information: Practices in the European Union Countries. *Government Information Quarterly* 22: 258-276.
- Puspita, Rora., Dwi Martani. 2012. *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Website Pemda Tahun 2010*. Paper dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 15, Balikpapan, 20-21 September 2012.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Serrano-Cinca, Carlos, Mar Rueda, Tomas, Pilar Portillo-Tarragona. 2008. Factors Influencing Edisclosure In Local Public Administrations. *Working Paper No. 2008-03*, Facultad De Ciencias Economicas Y Empresariales, Universidad De Zaragoza.
- Setyaningum, dyah.2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 9 Nomor 2, Desember 2012
- Simanjuntak, Payaman, J. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sugiono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

- Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2010, Yogyakarta.Pustaka Yustisa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wibisono, Yusuf. 2005. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.02*, Universitas Gajah Mada,
- Zimmerman, L. J. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research Vol 15*, 107-144.